

CURRICULUM VITAE

Matheus Nathanael, S.H., C.L.D.

Email: siagian.matheus@ijrs.or.id

Linkedin: [M.N. Siagian](#)



PROFIL SINGKAT

Matheus Nathanael, S.H., C.L.D. adalah peneliti dan konsultan perancangan peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang hukum pidana dan sistem peradilan pidana. Selain sebagai peneliti yang rutin terlibat dalam penelitian hukum dan sosial, Matheus juga tergabung dalam berbagai kelompok kerja (*working group*) penyusunan peraturan kebijakan dan legislasi di Kementerian/Lembaga Negara, seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum, dan Kementerian PPN/Bappenas.

JABATAN

Manajer Program untuk Divisi *Criminal Justice Reform* (CJR).

PENDIDIKAN

1. SMP Kolese Kanisius Jakarta (2012);
2. SMA Kolese Kanisius Jakarta (2015);
3. S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2020).

PELATIHAN/SERTIFIKASI

1. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Bersertifikat (*Certified Legislative Drafter/C.L.D*) dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi – Lembaga Sertifikasi Profesi Hukum Indonesia [No. Reg. HKM. 1945 00462 2024].

PENGALAMAN KERJA (PENELITI)

1. Manajer Program untuk Reformasi Sistem Peradilan Pidana di IJRS [berdasarkan SK No. 16/SK-Direktur/IJRS/VII/2024] (12 Juli 2024 - sekarang);
2. Peneliti IJRS (Juli 2020 - Juli 2024);
3. Asisten Peneliti MaPPI FH UI (November 2018 - Juni 2020).

PENGALAMAN KERJA (PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN)

A. Kejaksaan Agung:

1. Perancang Pedoman tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum (November 2025 - sekarang).
2. Perancang SE JAMPIDUM B-5433/E/Ejp/12/2025 tentang Tata Cara Penanganan Perkara pada Masa Transisi Perubahan Hukum Pidana dengan Berlakunya KUHP dan KUHP Baru (November 2025 - Desember 2025).
3. Anggota di Kelompok Kerja Akses Keadilan [Keputusan Jaksa Agung Nomor 166 Tahun 2021 tentang Kelompok Kerja Akses Keadilan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diperpanjang beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor 192 Tahun 2024] (Juli 2021 - sekarang), yang mengerjakan:
 - a. PERJA 4/2024 tentang Kode Perilaku Jaksa dan Tata Cara Pemeriksaan atas Pelanggaran Kode Perilaku Jaksa (2023-2024);
 - b. Pedoman 8/2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (2021-2022);
 - c. Pedoman 7/2022 tentang Tuntutan dan Pelaksanaan Putusan Pidana Denda Perkara Tindak Pidana Umum (Februari 2022 - Agustus 2022);
 - d. Pedoman 11/2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika (April 2021 - Desember 2021).
4. Tim Percepatan Perancangan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Kepegawaian Jaksa [Anggota di Tim Percepatan; berdasarkan SK JA Nomor 193 Tahun 2024] (Agustus 2024 - Desember 2025).
5. Tim Pendukung untuk Penyusunan RPJMN 2025-2029 dan RPJPN 2025-2045 [Anggota di Tim Pendukung; berdasarkan SK JA Nomor 191 Tahun 2024] (Agustus 2024 - Desember 2025).
6. Anggota Tim Kejaksaan untuk Pembahasan UU 22/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual [SPRIN JAMPIDUM Nomor PRIN-2646/E/Es.1/08/2021] (Agustus 2021 - April 2022).

B. Mahkamah Agung:

1. Tim Teknis di Kelompok Kerja Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) [SK

- KMA No. 238/KMA/SK.HK1.2.5/XII/2025] (Desember 2025 - sekarang), yang mengerjakan:
- a. Rancangan PERMA tentang Pemaafan Hakim (Desember 2025 - sekarang);
 - b. SEMA 1/2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025 (November 2025 - Desember 2025).
2. Anggota di Kelompok Kerja Perempuan dan Anak [SK 237/KMA/SK.HK2/XI/2024] (November 2024 - sekarang).
 3. Anggota di Kelompok Kerja Penyusunan Pedoman Mengadili dan Pemidanaan Perkara Narkotika [SK 265/KMA/SK/VIII/2022] (Agustus 2022 - sekarang), yang mengerjakan:
 - a. Rancangan PERMA tentang Pedoman Mengadili dan Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika (Agustus 2022 - sekarang).
 4. Tim Peneliti di Kelompok Kerja Penyusunan Format (*Template*) dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia [SK 62/KMA/SK/III/2019] (Maret 2019 - sekarang), yang mengerjakan:
 - a. Keputusan KMA Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang *Template* dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung (Maret 2019 - Desember 2022).
 5. Anggota di Kelompok Kerja Penyusunan Keberatan Terhadap Putusan Perampasan Barang-Barang Bukan Milik Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi [SK 85/KMA/SK/V/2021] (November 2021 - sekarang), yang mengerjakan:
 - a. PERMA 2/2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (November 2021 - Maret 2022).
 6. Anggota di Kelompok Kerja Penyusunan Pedoman Pemidanaan pada Perkara Tindak Pidana Korupsi [SK KMA No. 189/KMA/SK/IX/2018] (November 2018 - sekarang), yang mengerjakan:
 - a. PERMA 1/2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Anggota di Kelompok Kerja; berdasarkan SK 189/KMA/SK/IX/2018] (November 2018 - Januari 2020).

C. Kementerian Hukum:

1. Penyusun UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana [Anggota Tim Penyusun berdasarkan SK PPE.830.PP.01.01 TAHUN 2025] (April 2025 - Desember 2025).
2. Perancang Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan [Anggota di Panitia Antar Kementerian; berdasarkan SK PPE.1205.PP.01.01 TAHUN 2024] (Juni 2024 - sekarang).
3. Perancang Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara 20 Tahun [Anggota di

Panitia Antar Kementerian; berdasarkan SK PPE.1204.PP.01.01 TAHUN 2024] (Juni 2024 - sekarang).

4. Penyusun PP 55/2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (*Living Law*) [Anggota di Panitia Antar Kementerian; berdasarkan SK PPE.1203.PP.01.01 TAHUN 2024] (Juni 2024 - Desember 2025),
5. Perancang RUU Narkotika dan Psikotropika (2021 - sekarang).

D. Jaringan Masyarakat Sipil:

1. Drafter [Rancangan UU Hukum Acara Pidana, versi Masyarakat Sipil](#) (ICJR, IJRS, LeIP: 2025).
2. Drafter Rancangan UU Kesetaraan dan Anti-Diskriminasi versi Masyarakat Sipil [CRM].

PENELITIAN & PUBLIKASI

A. Buku:

1. [Terjemahan KUHAP Belanda \(*Strafvordering/Sv*\)](#) (IJRS: 2025);
2. [Selayang Pandang Sistem Peradilan Pidana Belanda - Intisari KUHAP Belanda \(*Wetboek van Strafvordering*\)](#) (IJRS: 2025);
3. [Infographic Booklet of Research on Impacts and Costs of Handling Narcotics Crime in Indonesia](#) (IJRS, CDS, LBHM, Lembaga Demografi FEB UI: 2025);
4. [Tinjauan KUHP 2023 - Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta](#) (Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta: 2025);
5. [Disparitas Putusan Pengadilan dalam Perkara Tindak Pidana Pencabulan dan Tindak Pidana Perkosaan](#) (AIPJ2: 2024);
6. [Pembaruan Hukum Acara Pidana Pasca Berlakunya KUHP 2023](#) (TAF: 2024);
7. [Asesmen Peraturan Internal Lembaga Penegak Hukum tentang Keadilan Restoratif terhadap KUHP 2023](#) (UNODC: 2024);
8. [Panduan Memahami Pidana Bersyarat dalam KUHP – Pedoman Bagi Penegak Hukum](#) (ICJR, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan: 2022);
9. [Faktor-Faktor Penentu Hukuman Mati di Indonesia: Sebuah Indikator](#) (TIFA: 2022);
10. [Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia](#) (ICJR: 2022);
11. [Booklet Infografis Penelitian Disparitas dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana di Indonesia](#) (OSF: 2022);
12. [Penelitian Disparitas dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Indonesia](#) (OSF: 2022);
13. [AUDIT KUHAP: Studi Evaluasi terhadap Keberlakuan Hukum Acara Pidana Indonesia](#) (ICJR: 2022);
14. [Kerangka Kelembagaan dalam Proses Penegakan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia](#) (Kementerian PPN/Bappenas: 2022);

15. [Buku Saku Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi](#) (USAID: 2021).

B. Media:

1. [Memberantas Korupsi melalui Reformasi KUHP](#) (Opini Kompas: 27 April 2025).
2. [Kasus Mario Dandy: Salah kaprah penerapan keadilan restoratif – pemulihan korban tidak boleh menghentikan proses pidana pelaku](#) (The Conversation Indonesia: 14 April 2023).

NARASUMBER, MODERATOR, DAN PENGAJAR (TRAINER)

A. Pembicara:

1. Narasumber dalam *Thematic Discussion: "Implementation of New Penal Code and New Criminal Procedure Code and Its Relevance to Consular Work"* hosted by British Embassy - Jakarta, Novotel Bogor Golf Resort & Convention Center (22 Januari 2026).
2. Pembicara dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI: "[Reformasi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan](#)" (8 Desember 2025).
3. Pembicara dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI: "[Revisi Ketentuan Pidana tentang Narkotika dalam RUU Penyesuaian Pidana](#)" (2 Desember 2025).
4. Pembicara dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI: "[Revisi Hukum Acara Pidana \(KUHP\)](#)" (29 September 2025).
5. Pemberi Sambutan dalam Acara Peluncuran Buku "[Terjemahan KUHP Belanda \(Wetboek van Strafvordering/Sv\)](#)", Fakultas Hukum UI - Depok (20 Juni 2025).
6. Pembicara dalam Rapat Tertutup Pimpinan Komisi III DPR RI: "[Arah Revisi Hukum Acara Pidana \(KUHP\)](#)" (8 April 2025).
7. Narasumber dalam Acara Diseminasi Hasil Penelitian: "[Pembaruan Hukum Acara Pidana Pasca Berlakunya KUHP 2023](#)", The Royal Kuningan (4 Juli 2024).
8. Narasumber dalam Diskusi Publik: "[Disparitas Pemidanaan: Menyoroti Konsistensi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Kekerasan Seksual](#)" hosted by The Conversation Indonesia, Zoom Online (28 Maret 2024).
9. Narasumber dalam Acara Peluncuran: "[Pedoman Kejaksaan No. 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup](#)", JS Luwansa (24 Oktober 2022).
10. Narasumber dalam Acara Diseminasi Hasil Penelitian: "[Disparitas dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Indonesia](#)", Zoom Online (28 Juni 2022).
11. Narasumber dalam Sosialisasi: "[Pedoman Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tuntutan dan Pelaksanaan Putusan Pidana Denda Perkara Tindak Pidana Umum](#)" hosted by Kejaksaan RI (4 Agustus 2022).

12. Narasumber dalam Diskusi Publik: "[Kajian Kritis Pedoman Penuntutan 11/2021 tentang Penanganan Perkara Narkotika](#)" hosted by Diponegoro Centre for Criminal Law & Persada UB, *Zoom Online* (6 Agustus 2021).
13. Narasumber dalam Sosialisasi Publik: "[PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi](#)", Mahkamah Agung (3 Desember 2020).

B. Moderator Diskusi Publik:

1. Moderator dalam Acara Sarasehan: "*Sarasehan Menyambut KUHP dan KUHP Baru: Seberapa Siapkah Kita Melaksanakannya?*", Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Jakarta (30 Januari 2025).
2. Moderator dalam Dialog Publik: "[Reformasi Kebijakan Narkotika dan Penerapan Harm Reduction di Indonesia](#)", Holiday Inn & Suites Jakarta Gajah Mada by IHG (4 Desember 2024).

C. Pengajar (Trainer):

1. Pengajar (*Trainer*) Peningkatan Kapasitas Topik: "*Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Perumusan Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Pidana terkait Narkotika*" di Direktorat Perancangan (6-7, dan 16 Januari 2026).

D. Narasumber/Pembicara Podcast Mainstream:

1. Bintang Tamu Podcast SKAKMAT Panji Pragiwaksono dengan tajuk "[Pantau RKUHAP](#)" (5 Agustus 2025);
2. Narasumber Podcast ESCAPE CLAUSE Prof. Topo Santoso dengan tajuk "[RUU KUHP Disorot Tajam](#)" (1 September 2025).

PENGALAMAN LAINNYA

1. Dosen Tamu Mata Kuliah Hukum Pidana di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa (6 Mei 2024 - sekarang).
2. Panitia Rapat Kesepakatan Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 - Kamar Pidana, Mercure Convention Center Ancol (9-11 November 2025).
3. Panitia Kunjungan Mahkamah Agung Belanda (*Hoge Raad der Nederlanden*) ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (15-21 Juni 2025).
4. Peserta Aktif dalam Diplomatic Meeting: "*New Criminal Procedure Code Bill*" bersama European Embassy, hosted by British Embassy - Jakarta (6 Mei 2025).
5. Peserta dalam High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas (1 September 2024 - 3 September 2024).
6. Peserta dalam Judicial Symposium on Terrorism Eradication yang diselenggarakan oleh Jakarta Centre For Law Enforcement Cooperation (JCLEC) UK Government, (16 Januari 2024 - 17 Januari 2024).

7. Fellowship pada South-East Asia Advocacy Program on Drug Policy yang diselenggarakan oleh RELEASE di London (England) dan Cardiff (Wales), United Kingdom (23 September 2023 - 9 Oktober 2023).
8. Juara 3 National Moot Court Competition (NMCC) Tjokorda Raka Dherana V, Fakultas Hukum Universitas Udayana (2018).
9. Peraih Penghargaan The Best Drummer, Universitas Indonesia Art War (2016).
10. Peraih Penghargaan The Best Drummer, Universitas Indonesia Art War (2015).